

AGRIBISNIS SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KEMAKMURAN EKONOMIK

Dr. Willem Dagi, MM

Sesungguhnya sektor agribisnis telah lama berkembang. Di USA dimulai sejak tahun 1920-1930 melalui industrialisasi gandum dan makanan ternak. Namun saat ini pola kedua jenis industri tersebut sudah meliputi berbagai proses manufaktur yang kompleks dan komputerisasi. Di Indonesia hal ini belum mendapat perhatian luas. Umumnya orang beranggapan bahwa agribisnis sama saja dengan usaha tani dari seorang petani, sehingga untuk apa melakukan hal tersebut, jika petani saja dapat melakukannya. Ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk Indonesia, kemudian terjadi kelangkaan pangan dan bahan kebutuhan pokok lainnya, barulah disadari betapa rapuhnya sistem pengadaan pangan di Indonesia. Namun sekali lagi terminologi sebagian kalangan, bahkan para kolega penulis, bahwa sistem agribisnis misalnya sistem pengadaan pangan, pasti selalu berhubungan antara bibit-tanah-panen-jual/dikonsumsi sendiri. Yah tak apalah, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan!

Data dari berbagai buku teks memperlihatkan bahwa semua negara maju memiliki sistem agribisnis yang tangguh. Agribisnis menjadi tulang punggung pemenuhan 75% kebutuhan manusia (Downey dan Erickson, 1992), sedangkan 25% terpenuhi dari sektor manufaktur non-agribisnis. Manusia bisa hidup tanpa komputer dan televisi, tetapi tidak bisa hidup tanpa makanan dan air bukan? Seharusnya logika dasar dan sederhana ini menjadi pertimbangan para pengambil keputusan makro ekonomi di Indonesia.

Ketika terjadi krisis ekonomi, lalu terjadilah *scarcity* (kelangkaan) pada sektor sembako (sembilan bahan pokok). Pemerintah ingin kembali membenahi sistem pengadaan pangan, tetapi sulit teratasi dalam waktu yang singkat, karena sejak awal 1980-an, kebijakan makro ekonomi mengarah pada teknologi tinggi dan menyerap modal besar. Akibatnya, infrastruktur agribisnis Indonesia mengalami degradasi perlahan-lahan. Untuk kembali pada awal 1980-an, di mana Indonesia terkenal dengan pengadaan sembako yang baik, sulit dilakukan. Lalu kita buru-buru impor daging kerbau dari India yang *high-risk* terhadap penyakit dan bisa berdampak pada *potential buffer-stock* dari kerbau dan sapi lokal. Jangan tanya lagi soal kedele dan beras.

Hukum *supply-demand* saat ini sudah irasional yang berdampak pada kebijakan harga yang sangat fluktuatif. Kepada siapa "kambing hitamnya"? Sudah pasti kepada para ahli pertanian yang sebenarnya "sudah hitam" sebelumnya, akibat tidak pernah mendapat perhatian, akibat kebijakan makro kita yang sejak dahulu menetapkan kebijakan pencapaian cadangan devisa sebesar mungkin, secepat mungkin, dan semudah mungkin, serta dengan hutang yang setinggi mungkin juga.

Dalam teori ekonomi, hukum maksimisasi laba (dalam waktu cepat) biasanya menanggung beban biaya yang tidak kecil, pasti dari hutang. Akibatnya, biaya pembangunan yang harus disalurkan ke sektor agribisnis menjadi berkurang. Akibat lebih lanjut, agribisnis hanya sebatas program tanpa mampu mencapai efisiensi dan efektivitasnya. Sudah bukan rahasia bahwa pembangunan pertanian selama ini hanyalah dijadikan sebagai program *political-will*, yang seharusnya sebagai *economic-will*.

SISTEM AGRIBISNIS

Pada awalnya dunia pertanian belumlah masuk dalam kategori industri. Lingkup penataannya dimulai dari bibit-tanah + air-panen-jual atau dikonsumsi sendiri. Ini terus

berlangsung, sampai suatu saat tanah dan air mulai menjadi terbatas (*scarcity*). Penulis ingat ketika mula-mula belajar ekonomi dengan buku pegangan karangan Samuelson edisi awal, dosen penulis tidak memasukkan air sebagai barang ekonomik. Namun sekarang air telah menjadi barang ekonomik bahkan sebagai suatu produk luks misalnya air mineral. Semakin mengalami *scarcity* suatu produk maka nilai harga akan semakin tinggi, sehingga aspek ekonominya akan semakin berperan.

Pada kondisi *scarcity* atas tanah dan air, maka saat itulah mulai disadari hukum efektivitas dan efisiensi harus diberlakukan. Hukum tersebut merupakan kaidah ekonomi, sehingga kaidah-kaidah bisnis pun harus mulai diperhatikan dan dimanajementi, agar memberikan *value added* yang maksimal.

Orang atau konsumen tidak lagi hanya sekadar mengkonsumsi suatu produk pertanian saja. Mereka mulai memperhatikan kualitas dengan harga yang setara. Produsen tidak lagi hanya melakukan produksi, tetapi mulai memperhatikan hukum-hukum permintaan dan pasokan (*the law of supply-demand*) dengan cara menginovasi pasar.

Produsen melakukan kiat manajemen untuk memperoleh produk berkualitas secara efisien dan efektif. Unsur manufaktur mulai dimasukkan, sehingga suatu produk primer pertanian, misalnya biji sawit diolah untuk mendapatkan produk olahan berupa minyak sawit, lalu dikenal dengan istilah agroindustri.

Tahap berikutnya: efisiensi, efektivitas serta kualitas menjadi perhatian utama untuk disikapi. Maka dikembangkanlah diferensiasi produk melalui berbagai proses manajemen operasi. Pada saat tersebut, dikembangkan sistem agribisnis agar dari suatu produk primer melahirkan berbagai *value-added*. Misalnya dari biji sawit, selain melahirkan minyak sawit, limbahnya diolah menjadi bahan-bahan kosmetik, farmasi, tekstil, pangan, serta senyawa-senyawa kimia lainnya. Salah satu senyawa tersebut dikenal sebagai ABE (aseton, butanol, dan etanol) yang diperlukan untuk kelancaran proses produksi berbagai industri non-pertanian. Misalnya aseton selalu dibutuhkan oleh industri minuman ringan, barang dan plastik, otomotif, maupun industri kapal/perahu. ABE ini diperoleh melalui proses fermentasi anaerobik dari limbah sawit, dan bersifat ramah lingkungan serta bernilai ekonomi yang cukup tinggi.

Unsur teknologi tinggi semakin jauh dikembangkan dalam agribisnis atau agro-industri. Mulai dari teknologi rekayasa genetika secara alamiah, hingga rekayasa dengan menggunakan tenaga atom (radiasi). Unsur-unsur bioteknologi tersebut, pada awalnya untuk tujuan kesejahteraan banyak orang, tetapi saat ini sudah masuk dalam tahap bisnis untuk selain aspek kesejahteraan orang, juga sekaligus mencapai maksimisasi laba.

Berdasarkan tahap perkembangan tersebut, maka dikembangkan lebih lanjut sistem agribisnis, di mana sistem tersebut terdiri dari 4 subsistem (bahkan beberapa ahli mengembangkan 5 sampai 6 subsistem), yaitu :

Subsistem 1: Sektor Masukan

Subsistem ini meliputi *input* produksi untuk menghasilkan produk primer. Yang dimaksud dengan produk primer adalah produk pertama hasil dari olahan kebun, misalnya biji sawit, tebu, bunga cengkeh, biji coklat, dan sebagainya. Sektor ini meliputi industri pengadaan dan rekayasa bibit/benih, industri agrokimia (pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan, dan sebagainya), industri agrotomotif (traktor, truk), industri mesin-mesin penunjang pertanian, dan sebagainya.

Pemilihan, rekayasa, produksi, maupun pembelian bahan-bahan tersebut merupakan suatu unit bisnis tersendiri di bidang agribisnis. Seorang pengusaha yang bergerak pada bidang subsistem ini sudah dapat memperoleh laba. Dia pun disebut pengusaha agribisnis.

Pada subsistem ini saja, sudah terlihat bahwa agribisnis tidak hanya berhubungan dengan tanah dan air saja, yang harus berkubang dengan lumpur. Menurut Beierlein, J.G., et al. (1986), di USA unit bisnis di subsistem ini mampu menghasilkan penjualan rata-rata US\$105 miliar per tahun. Suatu angka perbandingan yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan rencana bisnis di bidang sektor subsistem 1 ini.

Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia adalah intensifikasi dan eksplorasi tanah untuk *farm sector*. Akibatnya, secara teoritis, penambahan luas lahan menambah unit biaya eksplorasi lahan, sehingga suatu ketika tidak lagi dapat mendukung *farming systems* di tempat lahan tersebut. Itu antara lain yang mengakibatkan langkanya bahan pokok pangan saat ini. Unit biaya olahan tanah sudah tidak sebanding dengan unit harga yang diperoleh.

Subsistem 2: Sektor Produksi Primer

Sering disebut *on farm agribusiness* untuk menghasilkan produk primer seperti beras, daging sapi, telur, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Untuk menyentuh aspek "bisnis"-nya maka sektor ini juga menggunakan teknologi tinggi. Misalnya bagaimana dengan sebidang lahan yang sempit mampu menghasilkan jumlah unit produk yang banyak dan berkualitas. Penggunaan teknologi pada subsistem ini dilakukan secara intensif misalnya di Belanda, Jepang, Taiwan, Israel, dan negara-negara lain yang berlahan sempit.

Indonesia secara relatif dianggap masih berlahan luas, sehingga intensifikasi teknologi masih dalam pembahasan di ruang kuliah. Mengapa? Pada pembahasan mengenai hal ini, menurut sang profesor, mungkin karena Indonesia masih memiliki persepsi bahwa nilai teknologi tersebut tidak setara dengan nilai hasil jual per unit produk. Jika hal ini benar, maka tidak mengherankan jika kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia adalah intensifikasi dan eksplorasi tanah untuk *farm sector*. Akibatnya, secara teoritis, pertambahan luas lahan menambah unit biaya eksplorasi lahan, sehingga suatu ketika tidak lagi dapat mendukung *farming systems* di tempat lahan tersebut.

Itu antara lain yang mengakibatkan langkanya bahan pokok pangan saat ini. Unit biaya olahan tanah sudah tidak sebanding dengan unit harga yang diperoleh, walaupun memang diketahui bahwa kelangkaan tersebut juga diakibatkan oleh sejumlah faktor krisis lainnya.

Subsistem 3: Sektor Produk Hilir

Pada subsistem ini produk primer diolah menjadi produk hilir. Produk hilir tersebut bernilai ekonomi lebih tinggi daripada produk primernya. Misalnya dari biji sawit menjadi minyak makan dan produk olahan lainnya, ubi kayu menjadi tapioka dan produk olahan lainnya, karet menjadi ban dan lainnya, tebu menjadi gula dan bahan kimia lain, dan sebagainya. Pada sektor ini, rekayasa limbah dari olahan produk primer juga memberikan nilai ekonomis tersendiri bahkan bernilai ekspor. Misalnya dari limbah pengolahan tebu yaitu tetes-gula dijadikan MSG, bahan pemutih (*chlorin*), asam sulfat, asam klorida, pupuk cair, dan sebagainya (Dagi, W., 1998).

Indonesia umumnya belum banyak memberikan perhatian pada sektor ini. Sesungguhnya, optimalisasi sektor ini justru akan memberikan diferensiasi produk yang bernilai tinggi. Dibutuhkan banyak *entrepreneur* untuk masuk ke sektor ini, dan juga dibutuhkan akses informasi dari pemerintah dan universitas. Sebagai perbandingan, produk-produk ABE yang dapat diperoleh dari limbah: sawit, tapioka, tetes tebu, sago. Impor Indonesia pada sejak tahun 1989 atas ABE semakin meningkat, dari 4.638.473 kg

(1989) menjadi 13.947.668 kg (1994). Impor tersebut dari Belanda, Rusia, Jepang, Singapura, USA, dan Austria. Permintaan dalam negeri juga terus meningkat sampai tahun 1997. Ini menunjukkan bahwa jika kebijakan pemerintah maupun perusahaan agribisnis diarahkan pada optimalisasi sektor ini, maka agribisnis akan semakin dinamis. Hal ini membuktikan bahwa agribisnis yang berbasis kandungan lokal, lebih tahan di masa krisis ekonomi, dibandingkan dengan sektor lainnya, yang banyak menggunakan kandungan impor dan memerlukan modal besar dari hutang, serta rentan dengan fluktuasi mata uang.

Subsistem 4: Sektor Jasa Penunjang

Pada skala makro, subsistem ini meliputi jasa perbankan, transportasi, penelitian, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan sebagainya, sedangkan pada skala mikro, meliputi pemasaran, distribusi, dan sebagainya.

Kemacetan dinamika agribisnis cukup tersumbangkan oleh macetnya subsistem ini. Pada skala makro, kredit perbankan sangat kecil untuk agribisnis dibandingkan dengan manufaktur non-agribisnis, karena persepsi risiko pada sektor agribisnis. Tetapi ternyata sektor manufaktur non-agribisnis, memberikan kontribusi terbesar kegagalan perbankan di masa krisis ekonomi ini. Aspek penelitian dan penyuluhan belum mendapatkan perhatian penuh dari berbagai pihak. Selain masalah dana, juga karena masalah kelembagaan. Kelembagaan tersebut terlihat tumpang-tindih, bahkan antagonis, antara kebijakan pemerintah dari satu institusi dengan institusi lainnya. Belum lagi soal kebijakan perpajakan. Pajak agroindustri disamakan dengan pajak industri lainnya, padahal agroindustri sangat berhubungan dengan rekayasa sosial di lingkungan tempatnya beroperasi. Misalnya penyerapan tenaga kerja, sistem bapak-angkat, pendidikan formal dan informal masyarakat, penciptaan jalan, dan sebagainya.

Pada skala mikro, sistem pemasaran untuk menciptakan *marketing channel* masih kalah bersaing dengan produk impor, misalnya buah-buahan impor yang ternyata memiliki saluran distribusi mulai dari toko serba-ada sampai ke tingkat kecamatan. Seorang kawan yang baru pulang dari Jepang mengatakan, bahwa produk mebel dari Indonesia dikategorikan kelas dua, padahal mutu dan rancangannya jauh lebih baik daripada produk asal Cina, negara-negara Skandinavia, ataupun Kanada. Tetapi jika produk mebel Indonesia menggunakan pedagang perantara dari Eropa atau USA masuk ke Jepang, maka langsung masuk ke kategori produk kelas satu. Aneh dan tidak adil kelihatannya, tetapi itulah sistem pasar yang tercipta. Sewaktu kuliah penulis telah menyadari bahwa manajemen pemasaran, utamanya pemasaran internasional produk agribisnis perlu dikembangkan. Ternyata rumusannya

tidak semudah penyimpulan tersebut. Karena diketahui bahwa suatu produk agribisnis Indonesia sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah, maka produknya pun diidentikkan dengan citra negara (Indonesia). Untuk itu, usaha menggalakkan subsistem ini ke tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional membutuhkan peranan optimal yang jelas dan terfokus dari pemerintah bersama swasta.

AGRIBISNIS DI MASA AKAN DATANG

Pola subsistem tersebut mengikuti kaidah-kaidah yang bersifat generik. Pada masa ini evolusi agribisnis mulai menggambarkan kaidah-kaidah masa akan datang. Sebagai contoh, saat ini mulai dikenal dengan "pabrik pertanian" seperti di Singapura, Hongkong, Australia, dan sebagainya.

Di Singapura, melalui suatu pola pabrikan maka dapat dihasilkan sayuran yang tidak tergantung pada tanah, air, dan sinar matahari alami. Ketiga faktor tersebut diolah oleh komputer secara buatan. Di Australia, dengan menggunakan metode rekayasa genetika dan pola *greenhouse*, maka dapat dihasilkan pepaya maupun mangga yang segar dan enak, padahal tanaman-tanaman tersebut bukan tanaman lokal Australia. Bahkan Australia dapat mengembangkan pola "pabrik pertanian" untuk menghasilkan tanaman-tanaman kehutanan dengan jenis, ukuran, dan umur yang sama, serta dalam waktu yang relatif singkat, dibandingkan pembibitan alami dan *greenhouse*.

Ada kabar bahwa di USA sudah dikembangkan suatu varitas padi Rojolele-Amerika melalui rekayasa genetika dan dipatenkan. Nah, suatu ketika kalau petani kita di pedalaman mau menanam varitas Rojolele, maka harus bayar hak paten ke USA, padahal Rojolele bukanlah varitas lokal USA.

Kalau hal tersebut tidak disikapi, maka bersiap-siaplah petani kita harus nganggur, karena tidak mampu membayar paten atas benih atau bibit yang ditanamnya. Kemudian mereka akan mengalir ke sektor perkotaan, sehingga membuat beban sektor perkotaan akan semakin berat. Kecuali jika orang kota rela "lengser" ke desa dan menjadi petani, wah baguslah! Akan terlihat ibu-ibu petani putih kemerahan karena terik matahari, dan bapak-bapak petani yang sakit-sakitan karena tidak biasa berlumpur-lumpur (ini seandainya lho!).

AGRIBISNIS DAN SISTEM KEMAKMURAN

Mengingat kemampuan kreasi ekonomik dari sektor ini, melalui penciptaan puluhan bahkan ratusan bidang usaha, maka dapat ditekankan bahwa agribisnis dapat memberikan kontribusi terhadap sistem kemakmuran

rakyat dan negara Indonesia. Sebelum kita masuk pada uraian sintesis sistem agribisnis dalam sistem kemakmuran seperti pada judul tulisan, ada baiknya kita bahas lebih jauh dahulu Sistem Kemakmuran yang penulis maksudkan.

1. **Sistem Kemakmuran (SK)** yang penulis maksudkan adalah pola-pola pencapaian akses ekonomi dan informasi yang memberikan manfaat ekonomik secara adil, jujur, dan proporsional sesuai tipe pelaku ekonominya. SK harus dibentuk kembali (reformasi) dari "*state-approach*" menjadi "*people-approach*" (kedua istilah ini penulis tempatkan dalam konteks SK, untuk memudahkan penguraian).

Pola *state approach* mencirikan pengelolaan akses ekonomi dan informasi tersentralisasi kepada negara, di mana ciri ini sangat kuat tergambar pada Orla dan Orba. Asas manfaat hanya ditujukan untuk memakmurkan negara. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika negara makmur, maka akan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kenyataannya, jika kemakmuran negara tercapai maka rakyat hanya mendapatkan "jatah tetesan air" (*trickle-down effect*) tanpa mampu mengetahui, menilai, dan mengatur sumber-sumber kemakmuran yang dicapai, padahal pemilik negara adalah rakyat. Oleh karena itu terdapat kesan bahwa negara dimiliki oleh "bukan rakyat", sedangkan rakyat hanya menjadi "alat-negara", yang berarti menjadi "alat si bukan rakyat". Akhirnya yang terlihat adalah SK-Negara, dan bukannya SK-Rakyat. Di sinilah bibit munculnya kebutuhan reformasi ekonomi oleh rakyat, yang adalah si pemilik negara.

Di Singapura, melalui suatu pola pabrikan dapat dihasilkan sayuran yang tidak tergantung pada tanah, air dan sinar matahari alami. Ada kabar bahwa di USA sudah dikembangkan varitas padi Rojolele-Amerika melalui rekayasa genetika dan dipatenkan. Suatu ketika kalau petani kita di pedalaman mau menanam varitas Rojolele, maka harus bayar hak paten ke USA, padahal Rojolele bukanlah varitas lokal USA.

Pola *people-approach* menempatkan aspek manusia (rakyat) menjadi konsumen akses ekonomi dan informasi tanpa pemberlakuan kelas sosial. Pola ini menempatkan suatu tesis bahwa jika rakyat mampu mencapai kemakmurannya, maka secara otomatis negara akan mencapai kemakmurannya, tetapi sangat sulit tercapai jika sebaliknya, seperti yang diinginkan pola *state-approach*. Dalam konteks Indonesia, penulis sangat setuju jika hal ini disetarakan dengan Konsep Ekonomi Kerakyatan (silakan jika ada yang ingin mengoreksi).

Ekonomi Kerakyatan (EK) dalam pola tersebut, bukan hanya milik golongan rakyat tertentu, tetapi harus seluruh lapisan rakyat. Selama seorang warga negara Indonesia, siapa pun dia adanya, yang berpikir dan bertindak untuk kemakmuran bangsa Indonesia, maka dia patut disebut rakyat, yang memiliki hak di dalam sistem EK. Visi inilah yang sepatutnya dikembangkan melalui konsep EK.

Selama ini konsep EK yang didengungkan Menteri Koperasi (Adi Sasono), terdapat kesan bahwa EK hanyalah ditujukan untuk rakyat dari kelas "kecil" agar mampu menghadapi rakyat dari kelas "besar". Konsep EK tersebut tidak lagi menjadi murni *people-approach*, karena akan menghasilkan kelas-kelas sosial lagi sebagai hasil terminalnya. Kelas-kelas yang akan menimbulkan bentrok kepentingan ekonomi lagi.

2. **Agribisnis dalam SK.** Melalui pemahaman 4 subsistem agribisnis, terlihat bahwa agribisnis mampu menciptakan: a) perbanyak bidang/unit usaha, b) perbanyak lapangan kerja, c) perbanyak rantai unit usaha yang menciptakan unit usaha baru, d) peningkatan keseimbangan manfaat ekonomi secara proporsional antara setiap pelaku sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap/usaha bisnisnya, serta e) peningkatan stabilitas pemenuhan produk-produk kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan industri terkait.

Skala makro, melalui agribisnis, maka kelima hal tersebut akan menurunkan kerentanan ekonomi nasional dari kontraksi akibat tekanan global. Kesulitan-kesulitan pengembangan agribisnis akibat aspek kelembagaan (pemerintah, universitas, lembaga penelitian, koperasi, dan swasta) perlu dicari jalan ke luarnya. Komitmen politik dan ekonomi harus diciptakan, diproses, dievaluasi, serta direkayasa secara terus-menerus agar memberikan manfaat.

Pada era 1970-an hingga awal 1980-an, agribisnis Indonesia cukup memberikan kontribusi. Kelima lembaga tersebut, walau bekerja sendiri-sendiri, namun terfokus pada tujuan yang sama. Terbukti Indonesia tidak mengalami masalah sembako. Inovasi agribisnis sangat banyak

dikembangkan. Bahkan Filipina, Malaysia, dan Muangthai datang belajar ke Indonesia. Kondisi ini mulai meredup, ketika ditetapkan kebijakan pencapaian kemakmuran ekonomi jalur cepat melalui industrialisasi non-pertanian. Data jumlah hutang dalam US\$ dan ¥ Jepang semakin meningkat, tetapi tidak sebanding dengan jumlah risiko yang harus ditanggung saat ini.

Bukan maksudnya bahwa hanya melalui agribisnis saja akan tercapai SK, tetapi agribisnis hendaknya dipertimbangkan melalui pendayagunaan seluruh komitmen, sumber daya, dan keterlibatan kelima lembaga tersebut, ditambah dengan aspek perbankan, transportasi, perpajakan, dan sebagainya.

Konsep EK yang didengungkan Menteri Koperasi (Adi Sasono), terdapat kesan bahwa EK hanyalah ditujukan untuk rakyat dari kelas "kecil" agar mampu menghadapi rakyat dari kelas "besar". Konsep EK tersebut tidak lagi menjadi murni *people-approach*, karena akan menghasilkan kelas-kelas sosial lagi sebagai hasil terminalnya. Kelas-kelas yang akan menimbulkan bentrok kepentingan ekonomi lagi.

Kunci keberhasilan makro agribisnis dalam pola SK harus didukung oleh faktor-faktor infrastruktur sebagai berikut : a) komitmen lembaga perbankan, b) kemampuan lembaga pemerintah melakukan standarisasi kebijakan yang terfokus, c) kebijakan yang mampu mendorong penciptaan strategi bersaing produk-produk agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional, d) kebijakan yang mendorong kemitraan pengusaha besar agribisnis dengan pengusaha kecil agribisnis, e) penciptaan teknologi tepat guna, f) penciptaan rantai pemasaran, serta g) penciptaan sistem pengadaan SDM yang berkualitas.

Skala mikro, dilakukan melalui pengembangan teknologi: bibit dan benih, pengolahan, dan sistem informasi. Strategi integratif pada unit usaha meliputi peningkatan

efisiensi dan efektivitas proses produksi, kebijakan keuangan, sistem pemasaran, dan pendayagunaan SDM secara tepat. Kinerja strategi tersebut meningkatkan daya adaptif unit usaha terhadap perubahan-perubahan kebutuhan pasar.

Masih cukup banyak perusahaan agribisnis yang memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Pengamatan lapangan, misalnya pada industri kayu lapis dan minyak sawit, masih cukup tinggi tingkat *reject*. Proses produksi masih jauh dari *hygiene*. Pola pemasaran bersifat defensif, hanya menunggu konsumen, reaktif dan bukannya proaktif menciptakan pasar.

Aspek rekayasa teknologi masih cukup rendah. Hampir sering terlihat bahwa perusahaan agribisnis menggunakan teknologi yang agak uzur, atau membeli teknologi yang sudah hampir habis masa pakainya di negara asal. Untuk aspek perbenihan harus mulai dipikirkan ide Prof. Syamsuud Sadjad agar Indonesia mengembangkan bank benih dengan teknologi pendukungnya. Teknologi rekayasa genetika juga harus ikut dikembangkan. Sangat menyedihkan jika suatu ketika kita mencari benih kedele atau padi justru dengan membeli dari Belanda, Rusia atau negara lain.

Aspek kemitraan, melalui rantai pemasaran sangat memungkinkan adanya kerja sama antara pengusaha kecil agribisnis dengan pengusaha besar agribisnis. Setiap subsistem maupun hubungan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya, dapat dikembangkan variasi unit usaha. Karena beban biaya yang besar, maka seluruh unit usaha tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pengusaha besar. Sebagian unit usaha, dapat dilakukan oleh pengusaha kecil sesuai dengan kemampuannya secara profesional. Pola ini sebenarnya bukan suatu konsep baru, tetapi karena masih belum terlaksana dengan baik, maka harus selalu disampaikan.

PENUTUP

Semua negara maju memiliki sistem agribisnis yang tangguh, sehingga memberikan jaminan kestabilan pangan dan produk-produk olahannya, serta penambahan nilai ekonomik dari sektor ini. Umumnya negara-negara maju telah mengembangkan seluruh subsistem agribisnis, menjadi unit-unit bisnis yang kompetitif, sehingga lapangan kerja cukup banyak tercipta dan terserap. Akibatnya, perolehan manfaat ekonomi dijadikan cadangan pengembangan teknologi pendukung, dan penciptaan rantai pemasaran yang ekspansif dan kompetitif.

Agribisnis Indonesia dapat berkontribusi pada SK dalam skala makro maupun mikro, jika ditunjang oleh sejumlah kebijakan pemerintah, serta komitmen berbagai

pihak (pemerintah, universitas, lembaga penelitian, swasta dan perbankan). Pihak-pihak tersebut dapat diberikan insentif tertentu untuk mengembangkan teknologi dan rantai pemasaran.

Konsep EK sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan bentuk *people-approach* yang tanpa memandang status dan latar belakangnya, dapat disintesis dengan sistem agribisnis. Sebab melalui sistem agribisnis dapat tercipta berbagai unit usaha sebagai kesempatan berusaha, sehingga lapangan kerja akan meningkat.

Empat subsistem agribisnis dapat menjadi katalisator konsep EK, sebab keempat subsistem tersebut memberikan kesempatan usaha yang sama dan proporsional sesuai dengan kemampuan para pelakunya. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan para pelaku agribisnis untuk menjadi pemain bisnis yang handal, sekaligus memiliki tanggung jawab sosial.

Pada skala makro, dibutuhkan kebijakan yang mengarah pada penciptaan strategi bersaing yang memiliki keunggulan kompetitif sektor agribisnis Indonesia, demikian pula penciptaan pasar melalui pola distribusi, sedangkan pada skala mikro, harus dikembangkan strategi integratif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan kebutuhan pasar. Walaupun demikian, unsur teknologi tetap merupakan jawaban konkret dan rasional untuk meningkatkan dinamika agribisnis Indonesia, semoga!

DAFTAR PUSTAKA

1. Beierlein, J.G., Schneeberger, K.C., dan Osburn, D.D. (1986). *Principles of Agribusiness Management*. N.J.: Prentice-Hall, N.J.
2. Dagi, W. (1998). "Faktor-Faktor Strategik Pendukung Budaya Perusahaan PT. Miwon Indonesia," Laporan Hasil Penelitian (tidak dipublikasikan).
3. Downy, W.D., dan Erickson, S.P. (1992). *Manajemen Agribisnis*, edisi ke-2 (Bahasa Indonesia). Jakarta: Penerbit Airlangga.
4. Gumbira-Sa'id, E., dan Apriana, R. (1996). "Prospek Bisnis ABE dari Limbah Agro-industri Sangat Baik," *Bisnis Indonesia*.
5. (1998). "Reformasi ala Bungaran Saragih," *Kompas*, 24 November.

Ir. Willem Dagi, MM adalah Faculty Member Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
